

**Keputusan Wali Kota Salatiga
Nomor 000.7.2 / 303 / 2025
tentang**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Lampiran XXVII



**DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA**



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 303 / 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan sistematika terdiri atas:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;

c. Bab III : Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

d. Bab IV : Penutup.

KEDUA

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Lampiran II : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
- c. Lampiran III : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- d. Lampiran IV : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. Lampiran V : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Lampiran VI : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Lampiran VII : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Lampiran VIII : Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Lampiran IX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
- k. Lampiran XI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- l. Lampiran XII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
- m. Lampiran XIII : Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Lampiran XIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- o. Lampiran XV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Lampiran XVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Lampiran XVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Lampiran XVIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Lampiran XIX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Lampiran XX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- u. Lampiran XXI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
- v. Lampiran XXII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- w. Lampiran XXIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- x. Lampiran XXIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- y. Lampiran XXV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Lampiran XXVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- aa. Lampiran XXVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- bb. Lampiran XXVIII: Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
- cc. Lampiran XXIX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
- dd. Lampiran XXX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
- ee. Lampiran XXXI : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

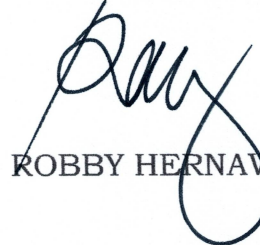
KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2025 telah dapat tersusun. Penyusunan Rencana Kerja perubahan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan renja kerja dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis segala pelaksanaan kebijakan, program maupun kegiatan operasional sebagaimana telah disusun dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Dengan dibuatnya rencana kerja perubahan terhadap pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang berdasarkan Visi dan Misi Walikota Salatiga sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Salatiga 2023 – 2026, akan dapat memberikan gambaran sejauh mana tingkat efektifitas dan efesiensi dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk menetapkan segala kegiatan, program dan kebijakan agar tepat sasaran serta berdaya guna dalam melaksanakan pembangunan di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan di Kota Salatiga.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan 2025 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga ini masih terdapat kekurangan untuk itu masukan, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan penyusunan rencana kerja pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- c. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

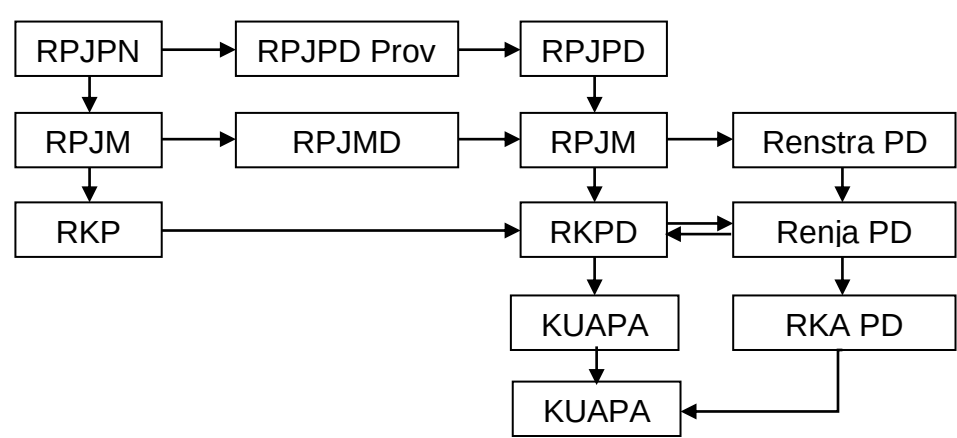
Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan dalam hal ini urusan perindustrian, urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi , sehingga dapat diketahui capaian kinerja perangkat daerah sebagai wujud kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lain di tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional. Rumusan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD juga dirancang untuk menjawab permasalahan yang

dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, kondisi saat pelaksanaan rencana ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi, sehingga diperlukan adanya perubahan rencana kerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024;
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026;
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025.
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. MAKSUD :

- a. Merespons perubahan regulasi maupun kebijakan pemerintah, serta merespons perubahan lingkungan, sehingga perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja yang membantu organisasi perangkat daerah dalam beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah.
- b. Meningkatkan kinerja dengan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dalam strategi, proses, atau sumber daya.
- c. Menyediakan satu Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis.
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan Jangka Menengah dan Program Kerja Tahunan.
- e. Menyiapkan semua faktor yang mendukung keberhasilan Pencapaian Tujuan Organisasi serta meminimalkan permasalahan yang dimiliki.

B. TUJUAN :

- a. Merencanakan perubahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan hasil organisasi.
- b. Mengevaluasi dan perbaikan dalam melakukan pengukuran kinerja dan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. Tersedianya dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan menentukan arah kegiatan dalam jangka waktu 1 tahun;
- d. Sebagai acuan yang dapat digunakan sebagai pengelolaan sumber daya, dan pola pelayanan masyarakat secara prima, sehingga dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi serta mengakomodasi perbedaan kepentingan serta mendorong proses pengambilan keputusan secara benar dan teratur dalam pencapaian hasil yang maksimal.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.3. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Program, Kegiatan dan Pendanaan

BAB IV PENUTUP.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pagu anggaran penetapan tahun 2025 sebesar Rp 10.395.369.558,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2025, adalah sebesar Rp. 3.507.922.274,- atau sebesar 33,74% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

REALISASI URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Periode 01 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025

Kode	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.402.938.204	876.708.798	62,49
2,07	Tenaga Kerja	1.402.938.204	876.708.798	62,49
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	646.644.256	209.911.228	32,46
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	646.644.256	209.911.228	32,46
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	646.644.256	209.911.228	32,46
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	0,00	0,00
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	0,00	0,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	170.000.000	161.257.820	94,86
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	170.000.000	161.257.820	94,86
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	170.000.000	161.257.820	94,86
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	0,00
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	0	0,00	0,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	586.293.948	505.539.750	86,23
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.787.348	11.850.000	29,05

Kode	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	40.787.348	11.850.000	29,05
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	545.506.600	493.689.750	90,50
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	230.872.400	228.689.850	99,05
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	49.634.200	0,00	0,00
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	265.000.000	264.999.900	100,00
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	8.890.060.014	2.631.213.476	29,60
3,31	Perindustrian	8.890.060.014	2.631.213.476	29,60
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.993.728.402	2.600.841.480	32,54
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	1.422.000	17,78
3.31.01.2.01.0006	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	1.422.000	17,78
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.069.025.933	2.137.343.503	52,53
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.045.105.533	2.126.603.503	52,57
3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.920.400	10.740.000	44,90
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	64.000.000	0,00	0,00
3.31.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	64.000.000	0,00	0,00
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.568.169	44.820.643	15,64
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.407.400	7.175.000	21,48
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	4.480.800	17,92
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.012.500	18.607.043	37,96
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000	3.331.300	41,64
3.31.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.500.000	1.150.000	15,33
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.648.269	10.076.500	6,16
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.944.641.300	69.930.000	2,37
3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.944.641.300	69.930.000	2,37
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.000.000	108.742.334	41,35
3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	300.000	30,00
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000	24.607.142	23,44
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.000.000	83.835.192	53,40
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.493.000	238.583.000	66,55
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.644.000	29.372.000	31,03
3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.690.000	3.025.000	12,77
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.969.000	198.971.000	99,50
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.190.000	7.215.000	17,95
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	896.331.612	30.371.996	3,39
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	896.331.612	30.371.996	3,39
3.31.02.2.01.0004	Kordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	94.217.252	9.991.596	10,60
3.31.02.2.01.0005	Kordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	802.114.360	20.380.400	2,54

Kode	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	36.080.640	-	0,00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	36.080.640	-	0,00
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	36.080.640	0	0,00
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	16.640.700	-	0,00
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	16.640.700	-	0,00
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	16.640.700	0	0,00
3,32	Transmigrasi	49.650.000	0	0,00
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	49.650.000	0	0,00
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.650.000	0	0,00
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.650.000	0,00	0,00
3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	0	0,00	0,00
TOTAL ANGGARAN		10.395.369.558	3.507.922.274	33,75

Apabila dibandingkan, total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 sebesar Rp 10.181.893.085,- dengan pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 10.395.369.558,- (sepuluh milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) mengalami kenaikan 2,1% dari tahun 2024 sebesar Rp. 213.476.473,- .

Realisasi anggaran TW II pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.507.922.274,- Review hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025, dan realisasi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan disajikan pada Tabel E.81 (terlampir)

- 2.1.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- A. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar :
 Urusan Ketenagakerjaan

Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, 2) Penempatan Tenaga Kerja, 3) Hubungan Industrial. Berdasarkan pembagian urusan tersebut maka kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja meliputi: pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan penempatan tenaga kerja, maka kewenangan Pemerintah kabupaten/kota meliputi: pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota, penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota, perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota. Kemudian terkait dengan hubungan industrial kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi: pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.

Berdasarkan pasal 16 Perwali Nomor 124/2021, Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang tenaga kerja sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial serta bidang transmigrasi sub urusan pembangunan kawasan transmigrasi.

Realisasi pelayanan ketenagakerjaan pada tahun 2024 dan realisasi tahun 2025 sampai dengan triwulan II tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Target Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Urusan Ketenagakerjaan

NO	INDIKATOR IKK / IKU	2024		2025		KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI s/d TW II	
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	97,08%	106,18%	98.,40%	106,18%	
2	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	50,00%	71,05%	50%	68,24%	

2	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	80,00%	68%	90%	68%	
3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	27%	100%	100%	71,43%	

B. Urusan Pemerintahan Pilihan : Urusan Perindustrian

Berdasarkan pasal 12 Perwali Nomor 13/2021, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah sub urusan perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi industri nasional. Realisasi pelayanan urusan perindustrian pada tahun 2024 dan realisasi tahun 2025 sampai dengan triwulan II meliputi:

Tabel 2.3.

Target Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Urusan Perindustrian

NO	INDIKATOR IKK/IKU	2024		2025		KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI s/d TW II	
1	Pertumbuhan IKM	0,37 %	0,43%	0,43%	0,43%	
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	31,05 %	33,10%	31,10%	31,10%	

C. Urusan Pemerintahan Pilihan : Urusan Transmigrasi

Berdasarkan pasal 16 Perwali Nomor 124/2021, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang transmigrasi adalah sub urusan pembangunan kawasan transmigrasi

Pencapaian target pelayanan pemerintahan urusan Transmigrasi sampai dengan Triwulan II sebagaimana terlampir tabel berikut:

Tabel 2.4
 Target Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Urusan
 Transmigrasi

NO	INDIKATOR IKK/IKU	2024		2025		KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI s/d TW II	
1	Persentase Peminat Transmigrasi	3,7 %	20%	4,07%	77,78%	
2	Persentase peningkatan Peminat Transmigrasi	4,06 %	0	4,8%	600%	Peminat tahun 2025 7 orang, peminat tahun 2024 1 orang

2.2. ISU-ISU Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

- A. Pada saat ini permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga adalah:
 - a. Belum optimalnya daya saing dan nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.
 - b. Belum optimalnya perkembangan sentra/klaster industri.
 - c. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri.
 - d. Masih terbatasnya sarana prasarana dan kelembagaan pelatihan ketrampilan kerja (BLK).
- B. Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut :
 - a. penanggulangan kemiskinan/pemberdayaan warga miskin.
 - b. peningkatan daya saing tenaga kerja (peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja) melalui pelatihan ketrampilan kerja.
 - c. peningkatan pembinaan IKM.
- C. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan OPD, adalah sebagai berikut :
 - a. Belum tersedianya Instruktur Balai Latihan Kerja;
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan ketrampilan kerja (BLK);
 - c. Masih rendahnya produktifitas IKM

2.3. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Beberapa factor menjadi bahan pertimbangan rasionalisasi sehingga perlu dilakukan perubahan rencana kerja pada tahun 2025, dimana terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan refocusing.

Review terhadap rancangan perubahan RKPD Tahun 2025 tersaji dalam table berikut.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

No	RANCANGAN RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Salatiga	Prosentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	70%	646.644.256	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Salatiga	Prosentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	45%	620.000.000	
			Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	0,04%				Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	0,03%		
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Salatiga	Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih	112 orang	646.644.256	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Salatiga	Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih	80 orang	620.000.000	
a	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Salatiga	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	112 orang	646.644.256	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Salatiga	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	80 orang	620.000.000	
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Salatiga	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100,00%	-	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Salatiga	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100,00%	-	
a	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Salatiga	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20	-	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Salatiga	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20	-	

No	RANCANGAN RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Salatiga	Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja	100,00%	170.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Salatiga	Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja	100,00%	161.500.000	
1	<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	<i>Salatiga</i>	<i>Terlaksananya Job Fair</i>	<i>100,00%</i>	<i>170.000.000</i>	<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	<i>Salatiga</i>	<i>Terlaksananya Job Fair</i>	<i>100,00%</i>	<i>161.500.000</i>	
a	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Salatiga	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 dokumen	-						
b	Job Fair/ Bursa Kerja (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Salatiga	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair	150 orang	170.000.000	Job Fair/ Bursa Kerja (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Salatiga	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair	150 orang	161.500.000	
2	<i>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Salatiga</i>	<i>Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>	<i>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Salatiga</i>	<i>Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>	
a	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Salatiga	Persentase CPMI/PMI yang mendapatkan perlindungan	100,00%	-	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Salatiga	Persentase CPMI/PMI yang mendapatkan perlindungan	100,00%	-	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Salatiga	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	35,00%	586.293.948	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Salatiga	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	32,00%	584.111.398	

No	RANCANGAN RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	29,00%				Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	27,00%		
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Salatiga	Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	11 kasus	40.787.348	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Salatiga	Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	11 kasus	40.787.348	
a	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Salatiga	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	40.787.348	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Salatiga	Persentase Pekerja yang telah Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	94,00%	40.787.348	

No	RANCANGAN RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Pesentase Angka Perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB)	100,00%	545.506.600	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Pesentase Angka Perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB)	100,00%	543.324.050	
a	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di	Salatiga	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	230.872.400	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Persentase perusahaan yang berpartisipasi dalam menciptakan Hubungan Industrial	30,00%	228.689.850	
b	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perindustrian	Salatiga	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	49.634.200	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Salatiga	Persentase LKS Bipartit yang Dibina	25,00%	49.634.200	
c	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Salatiga	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5235 Orang	265.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Salatiga	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5235 Orang	265.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Salatiga	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,48%	8.162.206.553	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Salatiga	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,48%	8.460.995.359	

No	RANCANGAN RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi capaian kinerja	6 dokumen	8.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi capaian kinerja	6 dokumen	8.000.000	
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Salatiga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Salatiga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	8.000.000	
2	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.237.504.084	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.460.006.084	
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	4.213.583.684	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	4.436.085.684	Selisih lebih guna mencukupi kebutuhan
b	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	23.920.400	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	23.920.400	
3	Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	64.000.000	Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Salatiga	Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	1 tahun	64.000.000	

No	RANCANGAN RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	Pengamaan barang milik daerah SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	64.000.000	Pengamaan barang milik daerah SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	64.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Salatiga</i>	<i>Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan</i>	<i>1 tahun</i>	<i>286.568.169</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Salatiga</i>	<i>Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran</i>	<i>1 tahun</i>	<i>320.568.169</i>	
			<i>Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran</i>	<i>1 Paket</i>							
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.407.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.407.400	
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.012.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.012.500	
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 tahun	7.500.000	

No	RANCANGAN RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	163.648.269	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	197.648.269	selisih lebih anggaran sebagai penunjang pelaksanaan
6	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang	Salatiga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	2.944.641.300	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Salatiga	Jumlah unit peralatan ,mesin dan gedung yang disediakan		2.944.641.300	
a	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Salatiga	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	665 unit	2.944.641.300	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Salatiga	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	665 unit	2.944.641.300	
b	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Salatiga	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Salatiga	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	-	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Salatiga	Jasa penunjang perkantoran	1 tahun	263.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Jasa penunjang perkantoran	1	268.642.550	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	105.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	105.000.000	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	157.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	162.642.550	Penyesuaian kenaikan standar honor

No	RANCANGAN RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Salatiga	Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	1 tahun	358.493.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	1 tahun	395.137.256	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	1 Unit	94.644.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 tahun	94.644.000	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	23.690.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 tahun	23.690.000	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.969.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	236.613.256	Perlu pemeliharaan yang bersifat darurat
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.190.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.190.000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Salatiga	Prosentase industri kota salatiga yang berkembang	0,38%	896.331.612	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Salatiga	Prosentase industri kota salatiga yang berkembang	0,38%	857.371.612	
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Salatiga	Terlaksananya Pengembangan Industri Kota Salatiga	31,10%	896.331.612	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Salatiga	Terlaksananya Pengembangan Industri Kota Salatiga	31,05%	857.371.612	

No	RANCANGAN RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan	1 Dokumen	94.217.252	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Salatiga	Cakupan IKM yang dibina (melalui pelatihan, pendampingan, sosialisasi dan fasilitas	5%	94.217.252	
b	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	802.114.360	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Salatiga	Jumlah klaster industri yang berkembang	2 unit	763.154.360	
								Jumlah produk IKM yg telah terpromosikan di	20 produk		
	PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA	Salatiga	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	75%	36.080.640	PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA	Salatiga	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	50%	36.080.640	
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,90%				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,80%		

No	RANCANGAN RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Salatiga	Jumlah Izin Industri yang diterbitkan	6 izin	36.080.640	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Salatiga	Jumlah Izin Industri yang diterbitkan	6 izin	36.080.640	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	36.080.640	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	36.080.640	

No	RANCANGAN RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Salatiga	Persentase Jumlah usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	5,60%	16.640.700	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Salatiga	Persentase Jumlah usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	5,10%	16.640.700	
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Salatiga	Terlaksananya Sosialisasi SIINas	100%	16.640.700	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Salatiga	Terlaksananya Sosialisasi SIINas		16.640.700	
a	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	16.640.700	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	16.640.700	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Salatiga	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	75%	49.650.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Salatiga	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	50%	49.650.000	

No	RANCANGAN RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif (000)	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Kebutuhan dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<i>Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Salatiga	<i>Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi</i>	<i>2 KK</i>	<i>49.650.000</i>	<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Salatiga	<i>Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi</i>	<i>2 KK</i>	<i>49.650.000</i>	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	49.650.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	49.650.000	
b	Penyuluhan transmigrasi	Salatiga	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	90 orang	-	Penyuluhan transmigrasi	Salatiga	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	90 orang	-	
TOTAL PAGU					10.563.847.709					10.786.349.709	- 222.502.000

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Penyesuaian Target Kinerja IKU, IKD

Berdasarkan capaian tahun sebelumnya, dan demi tetap realistis dan selaras dengan prioritas pembangunan Kota Salatiga khususnya pada urusan ketegakerjaan, perindustrian dan transmigrasi maka penyesuaian target perlu dilakukan. Adapun target indikator kinerja tahun 2025 dan penyesuaian target kinerja pada Renja Perubahan tahun 2025 adalah sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1.							
Indikator Tujuan Sasaran pada Renja Perubahan 2025							
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi				5,37	5,40 – 6,10	5,40 – 6,10
		Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0,43	0,43	0,46
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	33,10	31,10	33,50
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	juta Rp/TK	106,18	98,4	110,18
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Tingkat pengangguran terbuka			%	3,86	6,3	2,54-3,67
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	68,59	50	74,92
	Tingkat partisipasi angkatan kerja			%	70,72	69,97	70,85-71,62
		Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki izin	%	68	90	90
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	%	100	69,2	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam	Prosentase Peminat Transmigrasi			%	20	4,07	4,07
		Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Persentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	0	4,06	1

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Salatiga. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan indicator kinerja utama merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian arah kebijakan pembangunan pada bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga urusan Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2025 beserta perubahannya dapat dilihat pada tabel 3.2. dan table 3.3.

Tabel 3.2.					
Target Indikator Kinerja Utama pada Perubahan Renja 2025					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target Kinerja 2025	
				2025	Target Perubahan 2025
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86	6,3	2,54-3,67
2	Tingkat partisipasi angkatan Kerja	%	70,72	69,97	70,85-71,62
3	Persentase Peminat Transmigrasi	%	20	4,07	4,07

Tabel 3.3.					
Target Indikator Kinerja Daerah pada Perubahan Renja 2025					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target Kinerja 2025	
				2025	Target Perubahan 2025
1	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0,43	0,43	0,46
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	33,10	31,10	33,50
3	Tingkat ProduktivitasTenaga Kerja	juta Rp/TK	106,18	98,4	110,18
4	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	68,59	50	74,92
5	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki izin	%	68	90	90

3.2 Program Kegiatan dan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program yang akan dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 adalah 8 (delapan) Program , 15 (lima belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Program – program rencana kerja dan pendanaan tersebut dijabarkan secara rinci pada table berikut :

Tabel 3.4		
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah		
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		
Kode	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.400.755.654
2,07	Tenaga Kerja	1.400.755.654
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	646.644.256
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	646.644.256
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	646.644.256
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	170.000.000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	170.000.000
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	170.000.000
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	0
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	0

Kode	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	586.293.948
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.787.348
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	40.787.348
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	545.506.600
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	230.872.400
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	49.634.200
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	265.000.000
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	9.368.371.905
3,31	Perindustrian	9.318.721.905
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.408.628.953
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.483.926.484
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.460.006.084
3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.920.400
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	64.000.000
3.31.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	64.000.000
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.568.169
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.407.400
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.012.500
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000
3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.648.269
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.944.641.300
3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.944.641.300
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.000.000
3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.000.000
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.493.000
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.644.000

Kode	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3
3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.690.000
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.969.000
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.190.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	896.331.612
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	896.331.612
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	94.217.252
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	802.114.360
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	36.080.640
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	36.080.640
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	36.080.640
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	16.640.700
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	16.640.700
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional	16.640.700
3,32	Transmigrasi	49.650.000
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	49.650.000
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.650.000
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.650.000
3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	0
TOTAL ANGGARAN		10.786.349.709

BAB IV PENUTUP

Hasil dari pemikiran strategis berupa perubahan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga tahun anggaran 2025 ini mencakup keputusan yang diambil berkaitan dengan nilai-nilai strategis, visi, misi dan strategi organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.

Agar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga akan memfokuskan pada fungsi regulasi dan fasilitasi.

Selanjutnya rancangan rencana kerja ini agar dapat menjadi bahan Musyawarah Rencana Pembangunan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2026 untuk menjadi masukan dan perbaikan Rancangan RKPD Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2026.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

LAMPIRAN

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan ApabilaTidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indicator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			

10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.				
-------	---	--	--	--	--

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	()	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Formulir E.81. (Tabel 1)
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.57
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72.09
3	Persentase Pemikat Transmigrasi	25

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	(13)=(8)+(9)+(12)	(14)=(13)/(5) x 100 %	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	Rp	(6)	Rp	(7)	Rp	(8)	Rp	(9)	Rp	(12)	Rp	(13)	Rp	(14)	Rp	(15)
1	Meningkatnya pertumbuhan KM secara kualitas dan kuantitas	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kriteria Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	75	770,000,000	80	1,251,035,266	100	646,644,256	0	-	10	209,911,228	59	209,911,228		1,460,946,494		1.90	
				%	0.04		100		100		0.00		80			-		-			
		1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih	Orang	96	750,000,000	251	1,251,035,266	112	646,644,256	0	-	32	209,911,228	32	209,911,228		1,460,946,494		1.95	
		1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada	Orang	96	750,000,000	251	1,251,035,266	112	646,644,256	0	-	32	209,911,228	32	209,911,228		1,460,946,494		1.95	
		2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	%	100%	20,000,000	100	-	100	-	25	-	30	-	27	-		-		0.00	
		1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Ditina	Lembaga	20	20,000,000	25	-	20	-	2	-	25	-	27	-		-		0.00	
	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja	%	100	151,000,000	160	207,956,100	100	170,000,000	0	-	103.33	161,257,820	200	161,257,820		369,213,920		2.45	
		1 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah S DM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan melalui Blnk dan lain lain untuk Peningkatan kompetensi	orang	NA	-	23	28,261,900	NA	-	NA	-	NA	-		-		-			
		1 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah S DM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan melalui Blnk dan lain lain untuk Peningkatan kompetensi	orang	NA	-	23	28,261,900	NA	-	NA	-	NA	-		-		-			
		2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Job Fair	%	100	100,000,000	100	179,694,200	100	170,000,000	10	-	100	161,257,820	-	161,257,820		340,952,020		3.41	
		1 Pelayanan dan Penyediaan Info pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online (Kartir Hub)	orang	NA	-	NA		NA	-	0	-	NA	-	0	-		-		#DIV/0!	
		2 Job Fair/Bursa Kerja (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	%	16	100,000,000	4.43	179,694,200	14	170,000,000	0.00	-	1.003	161,257,820	0	161,257,820		340,952,020		3.41	
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja yang berorientasi pada kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja	3 Perlindungan P M (Pis dan Pura Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPM/PMI	%	100%	35,000,000	11.11	0	100.00	-	-84.00	-	-87.86	-	200	-		-		0.00	
		1 Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase CPM/PM yang mendapatkan perlindungan	%	100%	35,000,000	100	0	100	-	100	-	100	-	200	-		-		0.00	
		4 Pembinaan Perparipangan IMTA yang Lokal Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Asing yang memiliki izin	%	100	16,000,000	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-		-		0.00	
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perparipangan IMTA yang Lokal Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terdakanya pendataan dan money Tenaga Kerja Asing	persen		16,000,000	16	-	16	-	0	-	0	-	0	-		-		0.00	
		2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	37	150,000,000	94.44	250,427,000	100	586,293,948	66.67	-	100	505,539,750	288.69	505,539,750		755,966,750		5.04	

			Proses/ase Penisahan yang menerapkan tata kelola yang layak (P PPKS, LKS B. part, Struktur Skala Upah, dan terdapat peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	32		93.24		93.66	29.93		31.61		-	-	#DIV/0!		
	1	Pergerakan Peraturan Penisahan dan Pendaftaran Pegawai Keta Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	kasus	11	10,000,000	17	17,430,000	11	40,787,348	2	9	11,850,000	185.66	11,850,000	29,280,000	2.93	
	1	Penyelenggaraan Pendidikan dan Informasi SARA dan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Persentase Pekerja yang telah Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	%	98	10,000,000	92.08	17,430,000	98	40,787,348	93.47	0	92.19	11,850,000	185.66	11,850,000	29,280,000	2.93
	1	Penyelesaian dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angka Perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan secara Peradilan Bersama (PB)	%	100	140,000,000	94.44	232,997,000	100	545,506,600	66.67	-	100	493,689,750	103	493,689,750	726,686,750	5.19
	1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Persentase LKS B. part yang Diina	%	35	55,000,000	15.38	51,140,000	30	49,634,200	15.38	-	20.51	-	35.90	-	51,140,000	0.93
	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Bersifat Berdampak pada Kepentingan di 1	Persentase penisahan yang berpada pada dan mendapatkan Hubungan Industrial	%	40	85,000,000	21.73	181,857,000	35	230,872,400	32.17	0.00	34.97	228,689,850	67.13	228,689,850	410,548,850	4.83
	3	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terdaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	Na	Na	Na	Na	5235	265,000,000	0.00	0.00	5235	264,999,900	5235	264,999,900	264,999,900	
meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89.48	4,867,790,000	88.78	5,121,997,956	88.88	7,993,728,402	88.78	1,144,657,906	88.77	1,456,183,574	46	2,600,841,480	7,722,839,436	1.59
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Tersedianya dokumen perencanaan	dokumen	6	8,000,000	6	3,724,500	6	8,000,000	6	-	2	1,422,000	2	1,422,000	5,146,500	0.64
	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	6	8,000,000	6	3,724,500	6	8,000,000	6	-	2	1,422,000	2	1,422,000	5,146,500	0.64	
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi PNS serta pengelola	tahun	1	4,289,800,000	1	3,743,273,285	1	4,069,025,933	1	1,049,883,689	0.5	1,087,459,814	28	2,137,343,503	5,880,616,788	1.37
	1	Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Jumlah Orang yang Menerima Caji dan Tunjangan ASN	org/bulan	27	4,270,000,000	27	3,722,753,285	27	4,045,105,533	27	1,046,463,689	27	1,080,139,814	27	2,126,603,503	5,849,356,788	1.37
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	dokumen	1	19,800,000	1	20,520,000	1	23,920,400	1	3,420,000.00	1	7,320,000	1	10,740,000	31,260,000	1.58
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kemampuan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	tahun	1	18,000,000	1	35,081,367	1	64,000,000	0	-	0	-	1	-	35,081,367	1.95
	1	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang	dokumen	1	18,000,000	1	35,081,367	1	64,000,000	1	-	1	-	1	-	35,081,367	1.95
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran	tahun	1	203,290,000	1	133,903,558	1	286,568,169	0.25	33,681,700	0.5	11,138,943	6	44,820,643	178,724,201	0.88
	1	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	tahun	1	8,000,000	1	6,701,400	1	33,407,400	0.25	7,175,000	1	-	1.25	7,175,000	13,876,400	1.73
	2	Penyediaan Peralatan dan Perekengkapan Kantor		paket	1	-	1	0	0	1	-	-	-	1	-	-	#VALUE!	
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	tahun	1	20,000,000	1	19,230,000	1	25,000,000	0.25	4,480,800	0.5	-	-	4,480,800	23,710,800	1.19
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tahun	1	43,000,000	1	31,517,825	1	49,012,500	0.25	11,687,200	0.5	6,919,843	1	18,607,043	50,124,868	1.17
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	tahun	1	5,000,000	1	5,252,600	1	8,000,000	0.25	1,499,700	0.5	1,831,600	1	3,331,300	8,583,900	1.72
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	tahun	-	1	0	1	-	0.25	-	0.5	-	-	-	-	#DIV/0!	
	7	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	tahun	1	2,290,000	1	4,054,000	1	7,500,000	0.25	-	0.5	1,150,000	1	1,150,000	5,204,000	2.27
	8	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tahun	1	125,000,000	1	67,147,733	1	163,648,289	0.25	8,839,000	0.5	1,237,500	1	10,076,500	77,224,233	0.62

[illegible]

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SALATIGA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA							9.071.303.129,00	7.807.224.397,00	10.786.349.709,00	1.715.046.580,00							8.884.700.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.500.000.000,00	1.537.900.504,00	1.402.938.204,00	-97.061.796,00							1.610.000.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							1.500.000.000,00	1.537.900.504,00	1.402.938.204,00	-97.061.796,00							1.610.000.000,00	
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	144 Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 145 Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi				70 0,04 %	70 0,04 %	790.000.000,00	686.644.256,00	646.644.256,00	0,00							790.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang terlatih				80 orang	80 orang	750.000.000,00	646.644.256,00	646.644.256,00	-103.355.744,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Pencari Kerja		750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																	750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				80 Orang	112 Orang	750.000.000,00	646.644.256,00	646.644.256,00	-103.355.744,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEBPAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				100 %	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				20 Lembaga	20 Lembaga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	146 Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja				100 %	100 %	235.000.000,00	210.000.000,00	170.000.000,00	30.000.000,00							265.000.000,00	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Job Fair				100 %	100 %	200.000.000,00	175.000.000,00	170.000.000,00	-30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Pencari Kerja		225.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihadirkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>				150 Orang	150 Orang	175.000.000,00	175.000.000,00	170.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CFM/PMI</i>				100 %	100 %	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Calon Pekerja Migran Indonesia		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																			
			<i>Jumlah CFM/PMI yang Didukung dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>				4 Orang	4 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Salatiga, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	147 Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial 148 Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PPKS, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				35 29 % %	35 29 % %	475.000.000,00	641.256.248,00	586.293.948,00	80.000.000,00							555.000.000,00		
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pengesahan kasus perselisihan hubungan industrial</i>				11 kasus	11 kasus	50.000.000,00	45.310.548,00	40.787.348,00	-9.212.652,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Perusahaan di Kota Salatiga		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																			
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana 18 (PP/PPKS, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	45.310.548,00	40.787.348,00	-9.212.652,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Angka Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial Mogok Kerja yang diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB)</i>				100 %	100 %	425.000.000,00	595.945.700,00	545.506.600,00	120.506.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Perusahaan di Kota Salatiga, Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha		490.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Penyelesaian yang Dicegah</i>				10 Perkara	10 Perkara	300.000.000,00	241.688.000,00	230.872.400,00	-69.127.600,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>				1 Lembaga	1 Lembaga	125.000.000,00	89.257.700,00	49.634.200,00	-75.365.800,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			140.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																			
			<i>Tertakutannya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>				-	5235 Orang	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	Kota Salatiga, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CIKAI HASIL TERAKUAI (CHT)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL	DAERAH	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH		APBD 2025														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							7.571.303.129,00	6.269.323.893,00	9.383.411.505,00	1.812.108.376,00							7.274.700.000,00					
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							7.476.303.129,00	6.176.073.893,00	9.333.761.505,00	1.857.458.376,00							7.169.700.000,00					
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				88,98 %	88,98 %	6.431.303.129,00	5.077.778.533,00	8.384.708.553,00	-376.603.129,00							6.054.700.000,00					
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi laporan kinerja SKPD				6 dokumen	6 dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan		kota Salatiga		8.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Sodegro, Sodegro Lor	DAJIA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			8.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	4.783.498.115,00	3.791.438.533,00	4.460.006.084,00	-323.492.031,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan		ASN	4.294.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.761.498.115,00	3.769.438.533,00	4.436.085.084,00	-325.412.431,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAJIA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			4.270.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				
	3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	23.920.400,00	1.920.400,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAJIA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			24.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				
	3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	56.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	8.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan		Barang Milik Daerah	60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				
	3.31.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	56.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	8.000.000,00	Kota Salatiga, Sodegro, Sodegro Lor	DAJIA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran				1 paket 1 tahun	1 paket 1 tahun	312.500.000,00	330.907.400,00	286.568.169,00	-25.931.831,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan		kota Salatiga	345.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	33.407.400,00	33.407.400,00	13.407.400,00	Kota Salatiga, Sodegro, Sodegro Lor	DAJIA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Sodegro, Sodegro Lor	DAJIA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	57.000.000,00	49.012.500,00	-5.987.500,00	Kota Salatiga, Sodegro, Sodegro Lor	DAJIA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			56.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	Kota Salatiga, Sidorejo Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAH TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Salatiga, Sidorejo Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			8.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAH TENAGA KERJA
	3	NON URUSAN							7.571.303.129,00	6.269.323.893,00	9.383.411.505,00	1.812.108.376,00							7.274.700.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.476.303.129,00	6.175.073.893,00	9.333.761.505,00	1.857.458.376,00							7.169.700.000,00	
	3.31.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu							7.571.303.129,00	6.269.323.893,00	9.383.411.505,00	1.812.108.376,00							7.274.700.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							7.476.303.129,00	6.175.073.893,00	9.333.761.505,00	1.857.458.376,00							7.169.700.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							7.476.303.129,00	6.175.073.893,00	9.333.761.505,00	1.857.458.376,00							7.169.700.000,00	
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	163.648.269,00	-36.351.731,00	Kota Salatiga, Sidorejo Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAH TENAGA KERJA
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	650.305.014,00	237.463.600,00	2.944.641.300,00	2.294.336.286,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Terlaksanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah		700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAH TENAGA KERJA
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	665 Unit	237.463.600,00	237.463.600,00	2.944.641.300,00	2.707.177.700,00	Kota Salatiga, Sidorejo Lor	BANTUAN KEUANGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAH TENAGA KERJA
	3.31.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	412.841.414,00	0,00	0,00	-412.841.414,00	Kota Salatiga, Sidorejo Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAH TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang perkantoran				1 tahun	1 tahun	228.000.000,00	263.000.000,00	263.000.000,00	35.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah		236.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAH TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Sidorejo Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			1.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAH TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	35.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Keli/Desa Kota Salatiga, Sidorejo Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAH TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	157.000.000,00	157.000.000,00	157.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Sidorejo Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			160.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAH TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	-				-	-	393.000.000,00	382.969.000,00	358.493.000,00	-34.507.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah		411.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAH TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN REINSTR TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMIER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SABARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya				1 Unit	1 Unit	58.000.000,00	103.000.000,00	94.644.000,00		Kota Salatiga, Sidonejo, Sidonejo Lor	DANA AL-OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyetutupan.	09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	30.000.000,00	23.690.000,00	-1.310.000,00	Kota Salatiga, Sidonejo, Sidonejo Lor	DANA AL-OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyetutupan.	09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan			26.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	260.000.000,00	199.969.000,00	199.969.000,00	-60.031.000,00	Kota Salatiga, Sidonejo, Sidonejo Lor	DANA AL-OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyetutupan.	09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan			270.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	40.190.000,00	-9.810.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa Kota Salatiga, Sidonejo, Sidonejo Lor	DANA AL-OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyetutupan.	09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase industri kota Salatiga yang berkembang				0,38 %	0,38 %	955.000.000,00	1.007.295.360,00	896.331.612,00	60.000.000,00							1.015.000.000,00	
3.31.02.2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tertaksananya pengembangan industri kota salatiga Tertaksananya Pengembangan Industri Kota Salatiga				31.10 %	31.10 %	955.000.000,00	1.007.295.360,00	896.331.612,00	-58.668.388,00			Melanjutkan hilisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan	IKM		1.015.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0004		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	94.217.252,00	-55.782.748,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA AL-OKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan			165.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0005		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	805.000.000,00	857.295.360,00	802.114.360,00	-2.885.640,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA AL-OKASI UMUM (DAU) DISH CIUKAI HASIL TEMAKAU (CHT)	Melanjutkan hilisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan			850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	141 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (UII) Kecil dan Industri Menengah yang dibuktikan oleh instansi terkait 142 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dibuktikan oleh instansi terkait				76 0,9 % %	76 0,9 % %	60.000.000,00	60.000.000,00	36.080.640,00	5.000.000,00							65.000.000,00	
3.31.03.2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (UII), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kewenangan Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kewenangan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin industri yang diberikan				6 ijin	6 ijin	60.000.000,00	60.000.000,00	36.080.640,00	-23.919.360,00			Melanjutkan hilisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan	IKM		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.03.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di sub Kab. Kota sepanjang merupakan Perencanaan Model Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	36.080.640,00	-23.919.360,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA AL-OKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan			65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	143 Persentase usaha industri yang memiliki akun SINAS dan melaporkan data industri				5,6 %	5,6 %	30.000.000,00	30.000.000,00	16.640.700,00	5.000.000,00							35.000.000,00	
3.31.04.2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, UKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertaksananya sosialisasi SINAS				100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	16.640.700,00	-13.359.300,00			Melanjutkan hilisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimisasi penanggulangan kemiskinan	IKM		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.04.2.01.0001		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIFas)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	16.640.700,00	-13.359.300,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							95.000.000,00	94.250.000,00	49.650.000,00	-45.350.000,00							105.000.000,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pelaksanaan proses transmigrasi				75 %	75 %	95.000.000,00	94.250.000,00	49.650.000,00	10.000.000,00							105.000.000,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang diberangskalkan ke lokasi transmigrasi				2 KK	2 KK	95.000.000,00	94.250.000,00	49.650.000,00	-45.350.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Calon Transmigran		105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	69.250.000,00	49.650.000,00	-20.350.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				90 Kepala Keluarga	90 Kepala Keluarga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
			J U M L A H						9.071.303.129,00	7.807.224.397,00	10.786.349.709,00	118.305.090.651,00							8.884.700.000,00	